

Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015

Oleh : Moch. Jasin *)

ABSTRACT

Asean Economic Community (AEC) is a part of ASEAN cooperation skim agreed by ASEAN member countries as other form of ASEAN's cooperation on economic integration such as ASEAN Free Trade Area (AFTA), which was established during ASEAN Summit Meeting in Bali, Indonesia, year 2003. The objective of this research is to assess and examine how Indonesia could achieve the successful implementation of AEC in 2015?. How far the progress on the implementation AEC Blue print, which has been implemented since last year ?

How far Indonesia's competitively Strength compare to the other ASEAN member countries in implementing the principles and other arrangements agreed in the AEC. The method of this research using qualitative and descriptive analytical approaches. The results of this research is come up with the findings and the recommendations.

The research found that the AEC was considered useful to speed up the implementation of economic integration among the member of ASEAN countries by facilitating cross border movement of trade and investment; business services and other services; technology; capital; people and labour mobility etc. Indonesia faced some competitiveness obstacles namely: complicated bureaucratic procedures in providing business licenses; man power's competencies; high cost of money; poor infrastructure etc.

The research recommend to the Government of Indonesia should be consistence in implementing the so called "AEC blue print based on three main programs these are encourage to reach real implementation of common market; establish ASEAN competitive economic zone; and balance economic development among the member countries.

The research also recommend the government of Indonesia should enhance and promote the competitiveness of small and medium skill industry; simplify bureaucratic procedures, build integrated infrastructures as well as prevent and combat corruption.

Kata kunci : ASEAN Economic Community (AEC), AEC Blueprint

PENDAHULUAN

Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 menjadi tonggak awal terbentuknya kerjasama ekonomi ASEAN di mana pada awalnya tujuan dari deklarasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya.

Seiring berjalannya waktu, kerjasama ekonomi dalam implementasinya berjalan relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan kerjasama lainnya di bidang politik-keamanan dan social budaya. Kerjasama ekonomi lebih diarahkan pada pembentukan sebuah

komunitas ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*).

Asean Economic Community (AEC) merupakan bagian dari *ASEAN Community* selain bidang-bidang lainnya yang disepakati seperti *ASEAN Political-Security Community* dan *ASEAN Socio-Culture Community* yang dibentuk pada tahun 2003 pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia. AEC sendiri baru akan dibentuk pada tahun 2015 di mana ASEAN menyepakati terwujudnya suatu integrasi ekonomi kawasan yang dalam implementasinya mengacu pada *AEC Blueprint*.

AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015 yang di dalamnya memuat empat pilar utama, yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Sebagai bagian dari salah satu pilar komunitas ini, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan membuka peluang bagi negara-negara anggota.

Dengan adanya AEC juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN ke arah yang lebih signifikan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang dalam AEC 2015 serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya AEC 2015 tidak terjadi, padahal negara-negara ASEAN

lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam telah terus meningkatkan kualitas mereka dalam hal perekonomian. Perkembangan ICT (*information, communication, technology*), eskalasi pasar bebas antar negara yang semakin meningkat, iklim kompetisi di berbagai bidang kehidupan yang semakin ketat, demokrasi dan HAM, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia agar bisa hidup terus dan bertahan dalam percaturan kehidupan antar bangsa di dunia. (Zamrozi, 2000, h ; 158)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan dari penulisan karya tulis ini, yaitu:

1. Seberapa besarkah urgensi persiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi terwujudnya *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 ?
2. Bagaimana progres implementasi AEC *Blueprint* yang telah dilaksanakan di Indonesia?
3. Bagaimana kondisi daya saing Indonesia di berbagai faktor dalam menghadapi pelaksanaan kerjasama AEC.

BAHAN DAN METODE

Konsep Regionalisme

Di dalam studi hubungan internasional, regionalisme sangat erat hubungannya dengan studi kawasan (*area studies*). Menurut Mansbaach, *region* atau kawasan adalah pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan interdependensi dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi, serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. (Richard W. Mansbaach, dalam Nuraeni Suparman dkk, 2010, h.1)

Lebih lanjut, hal terpenting dari kajian regionalisme adalah meninjau derajat keeratan (*level of cohesion*), struktur dalam pelaksanaan peran atau percaturan politik

(structure of relations) dalam suatu kawasan, serta rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerjasama regional tersebut.

Proses menuju regionalisme memiliki beberapa tahapan, yakni; Pertama, regionalisasi, yakni merujuk pada proses pertumbuhan integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah, yang proses interaksi sosial dan ekonominya cenderung tidak terarah. Proses ini bersifat alami di mana dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga dan secara geografis berdekatan, melakukan serangkaian kerjasama guna memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri (May Rudy, 1997, h ; 22).

Proses kedua adalah proses kesadaran dan identitas regional. Pada tataran ini, kesadaran regional merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat, misalnya sering didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah atau agama.

Adakalanya kesadaran regional ini juga bersifat eksternal, terutama misalnya menyangkut masalah ancaman keamanan. Ketiga, proses regionalisme lebih dalam terikat lagi kedalam bentuk kerjasama regional antar negara. Kerjasama disini bisa memiliki tujuan yang sangat luas. Di satu sisi, kerjasama bisa menjadi sarana dalam merespon berbagai tantangan eksternal, di sisi lain kerjasama bisa dikembangkan guna menjamin tercapainya berbagai tujuan, nilai bersama atau sekedar untuk memecahkan masalah bersama.

Keempat, integrasi regional yang didukung oleh negara. Salah satu sub kategori penting dalam kerjasama regional adalah integrasi ekonomi regional. Integrasi regional melibatkan pembuatan kebijakan khusus oleh pemerintah yang disusun untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa, dan manusia.

Atau lebih lanjut bisa berupa perluasan penghapusan hambatan non-tarif, regulasi pasar dan pengembangan kebijakan bersama. Kelima, tahap kohesi regional. Pada level ini akan terbentuk 'tujuan akhir tertentu', yakni terbentuknya suatu komunitas politik yang baru. Fokusnya adalah penyatuan kedaulatan yang mengarah pada munculnya bentuk komunitas politik baru. Dalam konteks ini, Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*), bisa dijadikan contoh tahapan kohesi regional di kawasan Asia Tenggara. (May Rudy, 1997, h ; 22)

Terdapat dua premis dasar untuk memahami regionalisme, yakni pertama, regionalisme dipandang sebagai tanggapan terhadap globalisasi. Kedua, regionalisme dipandang sebagai produk dari dinamika internal suatu kawasan, berikut motivasi dan strategi-strategi dari aktor-aktor regional. (Marry Farrel, 2005, h.120)

Senada dengan konsep regionalisme, peneliti juga berkenan untuk memberikan sedikit rujukan tentang makna komunitas, sebagai konsep turunan dari regionalisme.

Menurut Emmanuel Adler dan Michael Barnett, komunitas memiliki tiga karakteristik, yakni; (1) para anggota komunitas berbagi identitas-identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. (2) mereka yang berada dalam komunitas memiliki hubungan langsung, interaksi yang terjadi bukan secara tidak langsung dan pada domain-domain khusus yang terisolasi, melainkan hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tatacara. (3) komunitas menunjukkan resiproitas yang mengekspresikan derajat tertentu kepentingan jangka panjang dan mungkin bahkan bersifat mementingkan orang lain (altruism); kepentingan jangka panjang didorong oleh pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi, dan altruism dapat dipahami sebagai suatu rasa kewajiban serta tanggung jawab. (Marry Farrel, 2005, h.120)

Teori Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi adalah rancangan dan implementasi serangkaian kebijakan khusus antar kelompok negara dalam region yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang maupun faktor produksi antar negara anggota. Integrasi ekonomi yang terbentuk meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter. Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya di antara negara-negara anggota yang sepakat akan membentuk suatu integrasi ekonomi.

Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitasnya, yaitu: (Walter and Andrew, 2009:46)

1. *Preferential Trading Arrangement* (PTA)
Merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). Contoh: *the Europe Agreements, the European Economic Area*, dll.
2. *Free Trade Area* (FTA)
Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan di antara mereka; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara. Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional
3. *Customs Union* (CU)
Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan sesama mereka; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan anggota juga akan diberlakukan penyeragaman ketentuan. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa CU merupakan bentuk integrasi ekonomi yang mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Contoh: *European Union* dan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA).
4. *Common Market* (CM)
Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. Jenis integrasi ini juga biasa disebut *Single Integrated Market*, yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Sebagai contoh, pembentukan pasar tunggal Uni Eropa yang dimulai pada tahun 1987 dengan target selesai pada 31 Desember 1992.
5. *Economic Union* (EU)
dari negara-negara bukan anggota. Contoh: India yang telah menandatangani kesepakatan bilateral dengan ASEAN, Sri Lanka, Thailand (kesepakatan FTA lain dengan ASEAN), dll.

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makro-ekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. *Economic Union* and *Monetary Union* (kesatuan ekonomi dan moneter) merupakan bentuk integrasi ekonomi dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Contohnya adalah Uni Eropa, ada pasar tunggalnya dan memakai satu kesatuan moneter (Euro).

6. *Total Economic Integration* (TEI) atau *Complete Economic Integration*
Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makro-ekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat “supra nasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya. Pada tahap ini, tidak lagi diperlukan kebijakan pengawasan ekonomi kepada unit-unit yang bergabung. Mereka telah menjadi satu kesatuan moneter dan fiskal secara penuh atau mendekati penuh. Uni Eropa adalah satu contoh yang baik mengenai integrasi ekonomi penuh.

Konsep Post Agreement

AEC sebagai salah satu pilar komunitas ASEAN merupakan hasil dari *post agreement negotiation* negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan melanjutkan dialog untuk mendorong kemajuan dan perkembangan dari implementasi perjanjian yang telah disepakati, kemudian proses negosiasi tersebut juga menjadi mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan kepentingan dalam implementasi perjanjian guna

menciptakan solusi dan mencapai kesepakatan yang akan ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Pada fase *post agreement negotiation* ini, aktivitas yang berlangsung di antaranya sebagai berikut: Walter and Andrew, 2009:46)

1. Berpartisipasi aktif dalam forum berkelanjutan di mana negosiator dari persetujuan yang telah terbentuk dapat melanjutkan ke tahap dialog dan negosiasi yang lebih detail dan lebih luas.
2. Memonitor dan mengevaluasi permohonan dari masing-masing negara berdasarkan ketentuan yang ada.
3. Mencari solusi permasalahan dalam pengimplementasian persetujuan serta mengembangkan dan memperbaiki persetujuan yang telah ada.
4. Bekerja sama dengan koalisi yang telah ada dan mengembangkan koalisi baru untuk mengimplementasikan persetujuan yang telah disepakati.

Selain itu, pada level domestik juga terjadi beberapa fase yang terkait dengan proses *Post Agreement Negotiation*, antara lain:

1. *Acceptance / Ratification Negotiation*
Negosiasi di tingkatan domestik yang berkonsentrasi pada penerimaan secara formal persetujuan di level nasional. Negosiasi di level ini melibatkan beragam *stakeholder* meliputi menteri pemerintahan terkait, partai politik, kalangan bisnis, *NGOs* dan media.
2. *Rule-Making Negotiations*
Berkonsentrasi pada pengembangan atau perubahan yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan, kriteria, standar yang berlaku dan target yang ingin dicapai negara dalam perjanjian internasional tersebut. Peserta negosiasi ditahapan ini biasanya meliputi pembuat undang-undang, birokrat pemerintahan dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengubah peraturan.

3. *Enforcement, Monitoring and Reporting Negotiations*

Pada tahapan ini proses negosiasi berkonsentrasi pada metode dan pendekatan untuk pengimplementasian undang-undang dan peraturan yang baru. Pada tahapan ini biasanya dihasilkan hukum atau peraturan yang baru.

Teori Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan secara sederhana didefinisikan sebagai satu langkah dalam memilih berbagai alternatif yang ada. Dalam teori pengambilan keputusan, para pengambil keputusan (Decision Makers) menganggap pandangan tentang dunia dari sudut tertentu (*the world as viewed*) lebih penting dibandingkan dengan realitas objektif itu sendiri. (Thomas Brewer, 2006:182-183)

Model pembuatan keputusan memiliki asumsi dasar perspektif bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, di mana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Perspektif ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosedur-prosedur kelembagaannya.

Selanjutnya, ada 3 model dalam pembuatan keputusan politik luar negeri sebuah negara, yaitu: (Graham Allison, 2003:275-279)

1. Paradigma aktor rasional

Aktor yang diwakili oleh pemerintah membuat keputusan yang diambil dengan menganalisis tujuan, menetapkan pilihan, menghitung keuntungan dan biaya (*cost and benefit*) dari masing-masing pilihan, dan mencapai pilihan yang memberikan keuntungan maksimal.

2. Paradigma proses organisasi

Organisasi mengembangkan pandangan kolektif, persepsi dan prosedur, sehingga reaksi dapat diprediksi. Tujuan dari organisasi didominasi oleh kebutuhan untuk menjaga eksistensi organisasi dan menghindari ancaman-ancaman yang datang.

3. Paradigma politik birokrasi

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hasil politik dari konflik dan kerjasama antar individu. Masing-masing aktor memiliki posisi, persepsi dan kepentingan. Dalam pembuatan keputusan terdapat proses tawar-menawar (*bargaining*). Hasil yang didapat oleh setiap aktor akan tergantung dari kekuasaan yang dimilikinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. (Lexy J. Moleong, 2007, hal 6)

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik, yang akan menggambarkan serta menganalisa bagaimana Indonesia melakukan persiapan dalam menghadapi AEC pada tahun 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, laporan resmi dan informasi dari jaringan internet yang terkait dengan pembahasan masalah. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, data online dan referensi lainnya yang tingkat

validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode content analysis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Persiapan Indonesia Menghadapi AEC 2015

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, di mana transaksi perdagangan antar-negara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apapun juga. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu terobosan dan kesempatan besar bagi negara yang siap dan mampu untuk mengembangkan perekonomiannya secara lintas batas. Secara sederhana, seberapa besar tingkat urgensi dari persiapan Indonesia menghadapi implementasi AEC 2015 dapat dikaji melalui besarnya manfaat dan peluang atau kesempatan yang dapat diterima Indonesia, tentunya dibandingkan pula dengan konsekuensi logis dampak/implikasi dari penerapan AEC 2015 tersebut.

Kesediaan Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya membentuk ASEAN Economic Community pada tahun 2015, tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan negara-negara anggota ASEAN. Di dalamnya terdapat peluang atau kesempatan yang besar, dan tentunya tantangan. Integrasi ekonomi dalam AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan. Di Indonesia sendiri tahapan dari pencapaian AEC sudah berjalan mencapai perkembangan peraturan perdagangan bebas dan mulai bergerak mendekati pengembangan sistem kepabeanan serta pembebasan hambatan-hambatan dalam faktor produksi guna menghadapi penerapan *Custom Union* dan *Common Market* ditahap selanjutnya.

Peluang bagi Indonesia pada AEC 2015 adalah: dari sisi jumlah tenaga kerja, sebagian besar penduduk ASEAN (39,1%) berada di Indonesia. Indonesia dapat menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga bisa menjadi pusat industri. Dari sisi pasar produksi, besarnya jumlah penduduk di kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Dari sisi peningkatan investasi, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, akan ditindaklanjuti dengan berbagai program kerjasama regional, maka ini akan memiliki nilai positif bagi semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Sedangkan tantangan yang muncul adalah bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan semua peluang yang ada di atas. Artinya, bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang berarti, maka Indonesia hanya menjadi negara tujuan pemasaran (objek) bagi kesepakatan Komunitas ASEAN 2015 (AEC). Persiapan yang matang dan peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia secara optimal menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk merealisasikannya. Pasalnya, Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*) jika dilihat dari kacamata ekonomi, akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi aliran barang, jasa, investasi, modal dan tenaga terampil yang bebas. (Sjamsul Arifin, dkk. , 2008)

AEC adalah sebuah revolusi ekonomi ASEAN di mana menjadikan sebuah wilayah

regional yang tidak memiliki batas untuk melakukan pergerakan barang dan jasa serta tenaga kerja yang didukung oleh modal baik domestik maupun asing. Tujuan dari penyatuan ekonomi dan moneter adalah untuk membuat perekonomian berfungsi lebih baik, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan kemakmuran yang lebih besar bagi negara-negara anggota. Manfaat tersebut meliputi:

1. *Manfaat bagi Konsumen:*

- a. *Persaingan yang semakin meningkat.* Konsumen bisa berbelanja lebih mudah lintas batas negara serta membandingkan harga. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan karena kompetisi antar toko-toko dan pemasok semakin meningkat.
- b. *Harga lebih stabil.* Pasar tunggal dengan mata uang dan kebijakan moneter tunggal akan membuat inflasi rendah dan stabil.
- c. *Meminjam lebih mudah dan murah.* Inflasi dan suku bunga yang rendah dan stabil membuat setiap orang lebih mudah dan murah untuk meminjam, misalnya untuk membeli rumah.
- d. *Lebih mudah dan murah melakukan perjalanan.* Mata uang tunggal akan menghapuskan biaya pertukaran mata uang sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan.

2. *Manfaat bagi pelaku bisnis:*

- a. *Suku bunga rendah berarti investasi akan meningkat.* Inflasi yang rendah akan membuat suku bunga juga rendah sehingga memudahkan pelaku bisnis melakukan pinjaman untuk berinvestasi.
- b. *Stabilitas ekonomi mendorong perencanaan jangka panjang.* Inflasi dan suku bunga yang tidak stabil merupakan biaya atau risiko tak terduga bagi pelaku bisnis, hal ini membuat riskan bagi perusahaan untuk berinvestasi jangka panjang. Stabilitas ekonomi dibawah EMU mengurangi ketidakpastian dan mendorong investasi jangka panjang bagi perusahaan.

c. *Risiko rendah mendorong perdagangan antar negara.* Perdagangan antar negara seringkali menggunakan mata uang yang berfluktuasi, sehingga untuk mengurangi atau mengimbangi risiko tersebut perusahaan akan menjual dengan harga tinggi di luar negeri. EMU dengan pasar dan mata uang tunggal akan menghilangkan risiko tersebut.

d. *Hilangnya biaya nilai tukar akan merangsang perdagangan dan investasi.* Mata uang tunggal akan menghilangkan biaya tukar yang tinggi antar negara ASEAN sehingga akan merangsang perdagangan dan investasi.

Selain manfaat di atas dan mungkin masih banyak manfaat lainnya dari integrasi ekonomi di ASEAN, terdapat juga beberapa konsekuensi negatif yang dapat terjadi, meliputi:

1. Biaya kerusakan dalam efisiensi ekonomi mikro, setidaknya sementara. Biaya pertukaran ke mata uang baru dapat bervariasi dan dapat meliputi biaya administrasi, biaya hukum, biaya psikologis, dan biaya lainnya. Keadaan khusus terutama diterapkan ketika negara-negara anggota salah memilih nilai tukar paritas nominal. Hal ini akan menyebabkan daya saing negara anggota menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daya saing negara-negara anggota lain.
2. Kesempatan bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas makro-ekonomi mereka menurun, karena nantinya akan menjadi tanggung jawab Bank Sentral bersama.
3. Akan sulit menyatukan berbagai macam kepentingan. ASEAN dengan latar belakang ekonomi, sosial budaya, bahasa maupun sejarah yang berbeda-beda akan sangat sulit mewujudkan integritas ekonomi tanpa adanya kerjasama dan kerja keras serta perencanaan yang matang.

Daya Saing Indonesia di Berbagai Sektor

Berdasarkan indikator kemudahan berusaha hasil survey pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh IFC sebagaimana terdapat pada tabel I, Indonesia mendapatkan skor 175 dalam kemudahan “memulai bisnis baru”, sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing mendapatkan skor 16 dan 91. Artinya di Indonesia sulit apabila memulai usaha baru

dibanding Malaysia dan Thailand. Indikator lain yaitu “penegakan hukum kontrak bisnis” dan penyelesaian sengketa bisnis masing-masing mendapatkan skor 147 dan 144, dan “perlindungan investor” mendapatkan skor rendah yakni 52. Berdasarkan data tersebut maka dapat diindikasikan bahwa di Indonesia kurang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha dibanding Malaysia dan Thailand.

Tabel 1. Peringkat Indikator Kemudahan Berusaha (< lebih baik)Sumber: International

	Peringkat Komposit	Kemudahan Memulai Bisnis Baru	Izin Aktivitas Konstruksi	Akses Listrik	Pendaftaran Properti Dagang	Kemudahan Mendapatkan Kredit	Perlindungan Investor	Intensitas Pembayaran Pajak	Kemudahan Perdagangan Antar Negara	Penegakan Hukum Kontrak Bisnis	Penyelesaian Sengketa Bisnis
Indonesia (2014)	120	175	88	121	101	86	52	137	54	147	144
Indonesia (2013)	116	171	77	121	97	82	51	132	52	146	142
Malaysia	6	16	43	21	35	1	4	36	5	30	42
Thailand	18	91	14	12	29	73	12	70	24	22	58
Filipina	108	170	99	33	121	86	128	131	42	114	100
Kamboja	137	184	161	134	118	42	80	65	114	162	163
India	134	179	182	111	92	28	34	158	132	186	121
China	96	158	185	119	48	73	98	120	74	19	78

Finance Corporation

Tabel 2. Perbandingan Indikator Ekonomi Makro antara Indonesia dengan China

Indonesia	Indikator	China
240,3 Juta Jiwa	Jumlah Penduduk	1,34 Milyar Jiwa
1,14 %	Pertumbuhan Penduduk	0,66%
4.000 Dollar AS	PDB Perkapita	6.500 Dollar AS
113,3 Juta Jiwa	Angkatan Kerja	812,7 Juta Jiwa
7,70%	Tingkatan Pengangguran	4,30%
5%	Inflasi	-0,80%
13,60%	Suku Bunga Kredit Bank Komersial	5,31%

2%	Pertumbuhan Produksi Industri	8,10%
391,008 km	Panjang Jalan Raya	3,6 juta km
772 km	Panjang Jalan Tol	53,913 km
134,4 Milyar kWh	Produksi Listrik	3,451 triliun kWh
119,3 Milyar kWh	Konsumsi Listrik	3,438 Triliun kWh

Sumber: BPS, diolah (2012).

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, yang cukup penting diamati dalam situasi persaingan pasca masuknya China dalam perdagangan bebas ASEAN atau China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang pertama adalah tingkat inflasi di mana tingkat inflasi Indonesia tahun 2012 sebesar 5% sedangkan China -0,80% hal ini akan berdampak terhadap lebih cepatnya kenaikan harga barang-barang atau

komuditas di Indonesia dibandingkan di China.

Di samping itu “suku bunga kredit bank komersial” perbandingannya sangat mencolok, yakni 13,60% Indonesia dan 5,31% di China, biaya modal yang tinggi akan mempengaruhi turunnya daya saing produk jadi dan jasa yang ditawarkan Indonesia kepada konsumen baik lokal maupun Internasional.

Tabel 3. Neraca Ekspor-Impor Antara Indonesia-China

	2011	2012	Jan-Feb 2013	Jan-13	Feb-13	Growth		
						Jan-Feb 2013/ Jan-Feb 2012	Jan-13/Des-12	Feb-13/ Jan-13
Ekspor Total (Juta USD)	22.941,0	21.659,5	3.528,6	1.634,9	1.893,7	16,8%	-20,9%	15,8%
Ekspor Migas	1.345,4	795,4	222,9	148,7	74,2	182,2%	47,3%	-50,1%
Ekspor Non Migas	21.595,6	20.864,0	3.305,6	1.486,1	1.819,5	12,4%	-24,4%	22,4%
Impor Total (Juta USD)	26.212,2	29.387,1	4.548,0	2.392,7	2.155,3	3,4%	-6,0%	-9,9%
Impor Migas	755,8	423,8	16,0	6,5	9,5	51,1%	39,8%	45,8%
Impor Non Migas	25.456,4	28.963,2	4.532,0	2.386,2	2.145,8	3,3%	-6,1%	-10,1%
Neraca Perdagangan (Juta USD)	-3.271,2	-7.727,6	-1.019,4	-757,8	-261,6	26,0%	-58,3%	65,5%
Migas	589,7	371,6	206,9	142,2	64,7	202,5%	47,7%	-54,5%
Non Migas	-3.860,8	-8.099,2	-1.226,3	-900,0	-326,3	15,2%	-56,5%	63,7%

Sumber: BPS, diolah

Neraca perbandingan Indonesia-China menunjukkan Indonesia dalam posisi defisit dari tahun 2011 – awal tahun 2013. Penyebab defisit neraca perdagangan karena impor non migas (barang-barang industri) jauh lebih besar dengan total ekspor Indonesia ke China dengan pertumbuhan -9,9% hingga awal tahun 2013. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu menjual produk-

produk dengan katagori bernilai tinggi (value added product).

Cadangan devisa Indonesia cenderung akan berkurang akibat neraca perdagangan posisi defisit. Untuk meminimalisir terjadinya defisit maka harus ada usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa ke negara-negara mitra dagang Indonesia diseluruh dunia termasuk China.

Tabel 4. Daya Saing dalam Menarik Investor Asing

Country	Foreign direct investments infow ^{4/5/}		Year-on-year change in foreign direct investments net inflow ^{3/4/}	
	US\$ million	US\$ million	US\$ million	percent
	2011	2012	2012	2012
Brunei Darussalam	1.208,3	864,8	(343,5)	(28,4)
Cambodia	891,7	1.557,1	665,4	74,6
Indonesia	19.241,6	19.137,9	(103,7)	(0,5)
Lao PDR	300,7	294,4	(6,4)	(2,1)
Malaysia	12.000,9	9.400,0	(2.600,9)	(21,7)
Myanmar	2.057,0	1.152,3	(904,7)	(44,0)
Philippines	1.815,9	2.797,0	981,1	54,0
Singapore	48.474,5	59.811,5	11.337,0	23,4
Thailand	3.861,1	10.699,2	6.838,1	177,1
Viet Nam	7.519,0	8.368,0	849,0	11,3
ASEAN	97.370,8	114.082,2	16.711,4	17,2

Sumber: *ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database, ASEAN Merchandise Trade Statistics Database, ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national statistics offices, central banks and relevant government agencies, and from international sources), diolah 2014.*

Bagi para investor asing khususnya yang berkecimpung di sektor riil atau investasi langsung (Foreign direct investmen inflow), Indonesia masih dalam kategori “menarik” bagi para investor asing dibanding dengan negara-negara ASEAN lain dengan total investasi masuk tahun

2012 sebesar 19,137.9 Million US \$, dibanding Malaysia sebesar 9.400,0 Million US\$, Filipina sebesar 2.797,0 Million US \$. Namun demikian “foreign direct investment inflow Indonesia mengalami penurunan sebesar (0,5) % dibanding tahun 2011.

Tingkat inflasi Indonesia pada Tahun 2012 tergolong tinggi sebesar 4,3 % dibanding dengan negara-negara kawasan ASEAN seperti Malaysia 1,2%, Thailand 3,6%, Philipina 3,0, Brunei Darussalam 0,2%. Hal ini menjadi salah satu penyebab mahalnya harga barang-barang di Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bunga tabungan jangka waktu tiga bulanan juga menunjukkan angka yang tinggi yakni 5,8%, sementara Malaysia

3,0%, Thailand 1,60-2,05 %, Brunei Darussalam 0,2%, Singapore 0,1%. Bunga tabungan yang tinggi akan berdampak kepada tingginya suku bunga kredit komersial di Indonesia, dimana tahun 2012 mencapai 13,60%. Berarti kegiatan usaha domestik sektor riil akan terhambat perkembangannya karena biaya keuangan (*cost of money*) yang tinggi sehingga produk akhir yang dihasilkan pelaku usaha lokal tidak kompetitif.

Tabel 5. International Merchandise Trade

Country	International merchandise trade ^{5/}					
	Ratio of exports to GDP	Ratio of imports to GDP	Ratio of total trade to GDP	Growth of nominal value of exports	Growth of nominal value of imports	Growth of nominal value of total trade
	percent	percent	Percent	percent	percent	percent
	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Brunei Darussalam	77,7	21,7	99,3	6,6	49,4	13,7
Cambodia	51,6	78,0	129,6	10,8	83,1	45,3
Indonesia	21,6	21,8	43,5	(6,6)	8,0	0,2
Lao PDR	29,2	38,6	67,8	52,0	58,6	55,7
Malaysia	74,6	64,4	138,9	(0,2)	4,8	2,0
Myanmar	18,1	17,8	35,9	14,7	35,0	24,0
Philippines	20,8	26,1	46,9	8,2	2,6	5,0
Singapore	143,6	133,5	277,1	(0,3)	3,8	1,7
Thailand	62,7	67,7	130,4	0,3	7,7	4,0
Viet Nam	80,8	80,0	160,8	20,1	8,7	14,1
ASEAN	54,1	52,7	106,8	1,0	6,6	3,7

Sumber: ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database, ASEAN Merchandise Trade Statistics Database, ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national statistics offices, central banks and relevant government agencies, and from international sources), diolah 2014.

“Perbandingan perdagangan internasional terhadap GDP” Indonesia tahun 2012 tercatat 43,5%, malaysia 138,9%, Thailand 130,4%, Singapura

227,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan Internasional Indonesia terhadap GDP rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. “Pertumbuhan nilai nominal total perdagangan Internasional” Indonesia tercatat 0,3%, Malaysia 2,0%, Thailand 4,0%, Filipina 5,0%. Pertumbuhan nilai

perdagangan Internasional Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karenanya dapat diidentifikasi bahwa nilai ekspor Indonesia belum maksimal memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tabel 6. Global Competitiveness Index (Indeks Daya Saing Global) Indonesia

CI	Peringkat (dari 144 negara)
Persyaratan dasar (40%)	58
1.Kelembagaan	72
2.Infrastruktur	78
3.Stabilitas ekonomi makro	25
4.Kesehatan dan pendidikan dasar	70
Pendorong efisiensi (50%)	58
5.Pendidikan tinggi dan pelatihan	73
6.Efisiensi pasar barang dan jasa	63
7.Efisiensi pasar tenaga kerja	120
8.Kecanggihan pasar keuangan	70
9.Kesiapan teknologi	85
10.Luas pasar domestik	16
Faktor-faktor inovasi dan kecanggihan (10%)	40
11.Kecanggihan bisnis	42
12.Inovasi	39

Sumber: *World Economic Forum* (2012)

Indeks daya saing global Indonesia tahun 2012, menduduki peringkat 50 dari 144 negara yang dilakukan oleh survey. Di bawah indikator pendorong efisiensi yang skornya memprihatinkan adalah “efisiensi pasar tenaga kerja” dengan skor 120. Artinya tenaga kerja Indonesia tidak produktif dan tidak kompetitif. Untuk “kesiapan teknologi” Indonesia berada pada

peringkat 85 dan indikator infrastruktur menempati peringkat 78. Teknologi dan infrastruktur cukup besar pengaruhnya terhadap terciptanya efisiensi dalam kegiatan usaha. Berdasarkan data pada indeks daya saing global, Indonesia menduduki peringkat yang belum menggembirakan.

Tabel 7. Indeks Persepsi Korupsi

Country	Corruption Perceptions Index		
	Rank	Score	
	2013	2013	2012
Brunei Darussalam	38	60	55
Cambodia	160	20	22
Indonesia	114	32	32
Lao PDR	140	26	21
Malaysia	53	50	49
Myanmar	157	21	15
Philippines	96	36	34
Singapore	5	86	87
Thailand	102	35	37
Viet Nam	116	31	31

Sumber : *cpi.transparency.org*

Indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2013 mendapatkan skor 32 (peringkat ke 114), Malaysia skor 50 (peringkat 53), Brunei Darussalam skor 60 (peringkat 38), dan Singapura 86 (peringkat 5). Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia tercatat mempunyai peringkat yang tinggi setelah Kamboja dan Laos. Internasional Transparency menghimpun informasi melalui pengakuan responden yang

berprofesi sebagai pelaku usaha asing maupun domestik atas persepsi mereka terhadap layanan publik di Indonesia apakah masih banyak praktek korupsi atau tidak sesuai pengalaman mereka dalam mengurus perijinan maupun non perijinan. Peringkat yang diperoleh Indonesia menunjukkan masih meluasnya praktek korupsi di Indonesia baik di Pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 10. Indeks Konsultasi Resiko Ekonomi dan Politik

Country	Year			
	2011	2012	2013	2014
Brunei Darussalam	n.a	n.a	n.a	n.a
Cambodia	9,27	6,83	7,84	8
Indonesia	9,25	8,5	8,83	8,85
Lao PDR	n.a	n.a	n.a	n.a
Malaysia	5,7	5,59	5,38	5,25
Myanmar	n.a	n.a	n.a	n.a

Philippines	8,9	9,35	8,28	7,85
Singapore	0,37	0,67	0,74	1,6
Thailand	7,55	6,57	6,83	8,25
Viet Nam	8,3	7,75	8,13	8,73

Sumber: asiarisk.com

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey Internasional “Political Economic Risk Consultancy” yang berpusat di Hongkong, Indonesia tahun 2014 mendapatkan skor tertinggi di antara negara-negara ASEAN yakni 8,85 diikuti Vietnam 8,73 dan

Kamboja 8. Hal ini didasarkan pada fakta yang dihimpun oleh peneliti PERC bahwa ditinjau dari aspek politik dan ekonomi Indonesia masih kurang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha khususnya di bidang perdagangan dan investasi baik sektor riil maupun portofolio.

Tabel 11. Indeks Pendidikan

Medium EDI Intermediate Position (0.80-0.94)

No	Negara	<i>EFA Development Index Variation</i>			<i>Primary adjusted net enrolment ratio (NER)</i>
		2004	2011	2004-2011 (in relative term)	
1	Indonesia	0.927	0.947	2.2	2.7
2	Iran, Palestina	0.900	0.945	5.0	3.3
3	Syria	0.911	0.936	2.7	1.0
4	Tunisia	0.900	0.915	1.7	0.0
5	Malta	0.948	0.912	-3.7	1.2
6	El Savador	0.838	0.910	8.7	8.0
7	Cape Verde	0.897	0.900	0.2	-4.7
8	Pilipina	0.884	0.989	1.6	-2.1
9	Egypt	0.873	0.898	2.8	0.4
10	Maroco	0.741	0.813	9.7	10.7
11	Lao DR	0.744	0.808	8.7	19.3

Sumber: unesco.org

Indek pengembangan pendidikan Indonesia termasuk dalam kategori menengah (intermediate position 0.80-0.94) dengan skor 0.947. Indonesia berada pada rumpun yang sama dengan negara ASEAN lainnya seperti Laos skor 0.744, Filipina 0.884. Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan menekankan pembelajaran pada

nilai dan moral pada jenjang dasar pada usia dini, melalui pengembangan kurikulum 2013, diharapkan generasi penerus Indonesia dapat memajukan negara Indonesia melalui pembentukan integritas dan profesionalitas yang tinggi sehingga segala bentuk penyimpangan yang berindikasikan korupsi akan menjadi berkurang.

Tabel. 12. Analisis SWOT Indonesia 2015

STRENGTH	WEAKNESS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dengan tingkat pendapatan yang cenderung meningkat merupakan potensi pasar domestic yang sangat tinggi. 2. Perekonomian Indonesia relative stabil walaupun ditengah guncangan ekonomi global. 3. Praktik demokrasi di Indonesia sudah relative kondusif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan berlanjut di 2014, akibat masih lemahnya ekspor dan tingginya impor, terutama impor migas. 2. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang beresiko dalam hal dikaitkan dengan kondisi birokrasi baik di pemerintah pusat maupun daerah. 3. Tenaga kerja yang tingkat produktifitasnya rendah akibat kurangnya kompetensi . 4. Kondisi prasarana (infrastruktur) yang jelek berpengaruh terhadap efisiensi.
OPPORTUNITIES	THREAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan imbal hasil yang tinggi serta pasar yang besar, Indonesia masih dilihat sebagai tujuan investasi yang menarik di mata investor. 2. Harga komoditas dunia diperkirakan akan berangsur semakin membaik di 2014. 3. Terdapat potensi aliran dana masuk ke Negara-negara berkembang bila stimulus keuangan Jepang berlanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi aliran dana keluar (<i>hot money capital outflow</i>) akibat <i>tapering off</i> stimulus keuangan AS tetap ada di 2014 (sekitar akhir kuartal I-2014). 2. Tekanan inflasi di tahun 2014 diakibatkan mulai dikurangnya subsidi BBM memicu naiknya harga barang-barang termasuk berbagai komponen dasar industri berpotensi melemahkan minat investasi ke Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Konsep perdagangan bebas ASEAN yang telah dirintis dengan kesepakatan pembentukan ASEAN *Free Trade Area* pada tahun 2003, telah membawa perdagangan Intra ASEAN meningkat. Pelaksanaan program penurunan tarif melalui *fastrack* dan *normal track* program memicu meningkatnya perdagangan di kawasan ASEAN produk hasil industri maupun produk primer. Pasca krisis ekonomi di kawasan ASIA Timur dan Asia Tenggara pada tahun 1997 – 1998, telah mendorong negara-negara yang secara langsung terkena krisis untuk memperbaiki sistem ekonomi dan penguatan sistem hukumnya, sehingga fundamental ekonomi makro berangsur membaik.

Kesepakatan negara-negara ASEAN dalam membentuk pola kerjasama baru yang disebut AEC tahun 2015 dianggap sebagai terobosan dan kesempatan besar bagi negara yang siap dan mampu untuk mengembangkan perekonomiannya secara lintas batas. AEC akan memfasilitasi atau mempermudah lintas batas antar negara-negara ASEAN di bidang perdagangan dan investasi lintas batas manusia khususnya pencari kerja dengan kompetensi skill dan semi skill labour atau terampil dan semi terampil, lintas batas teknologi dan lintas batas barang dan jasa.

Tantangan bagi Indonesia atas keterlibatan dalam AEC tahun 2015, bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan peluang untuk menjadi negara tujuan investasi sehingga dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang merupakan angkatan kerja terbesar diantara negara-negara ASEAN. Di sisi lain AEC diyakini akan membawa nilai manfaat bagi konsumen negara-negara ASEAN antara lain: konsumen akan mempunyai banyak pilihan produk/jasa yang akan dibeli;

kemudahan mobilitas dalam lintas batas; akses dana yang mudah dan murah karena adanya lintas batas industri perbankan.

Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal atas keikutsertaan Indonesia di AEC, maka Indonesia harus banyak melakukan pembenahan karena berdasarkan kondisi persaingan Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia lemah diberbagai bidang dibanding negara-negara ASEAN, antara lain: rendahnya kemudahan berusaha; rendahnya daya saing dengan produk-produk China yang baru bergabung dalam AFTA; rendahnya daya saing dalam menarik investor asing; rendahnya *ratio* perdagangan Internasional terhadap GDP; rendahnya daya saing global; tingkat korupsi yang masih tinggi; tingginya resiko dalam berinvestasi, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia.

Beberapa hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Konsisten dalam melaksanakan AEC *blueprint* dengan berpedoman kepada tiga program, yakni:

- a. Program menuju pasar tunggal dan basis produksi, yang antara lain: fokus kepada peningkatan daya saing dan pemanfaatan komitmen AEC serta komitmen AEC untuk arus barang dan arus jasa secara bebas.
- b. Program menuju wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi, yang difokuskan kepada kebijakan persaingan, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan perdagangan secara elektronik.
- c. Program menuju kawasan dengan pembangunan ekonomi yang seimbang, yang fokus kepada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.

Mengintegrasikan ekonominya ke dalam AEC Blueprint, dengan melakukan dukungan terhadap Pasar Produk Dalam Negeri. Dukungan tersebut di antaranya adalah:

- a. Penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif melalui reformasi kebijakan pendukung investasi.
- c. Pengembangan kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus.
- d. Melakukan peningkatan pelayanan perizinan perdagangan bagi dunia usaha dan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA.

Mengembangkan sektor perdagangan dan daya saing Indonesia di masa mendatang antara lain: *a)* meningkatkan daya saing perekonomian nasional, peningkatan daya saing perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan dunia usaha, terutama dalam menghadapi peningkatan kompetisi di masa-masa mendatang; *b)* meningkatkan promosi ekspor terpadu, diperlukan keterpaduan promosi untuk meningkatkan ekspor Indonesia, baik dari segi penyelenggaraan maupun program; *c)* meningkatkan kiprah ekspor UKM, antara lain penyediaan fasilitas, program pelatihan dan pendanaan bagi usaha berskala kecil dan menengah perlu terus ditingkatkan, khususnya peningkatan kompetensi UKM agar kiprah UKM dalam perdagangan internasional meningkat; *d)* menata sistem perdagangan nasional, perubahan peta kompetisi dan aturan main perdagangan dunia menuntut penataan menyeluruh atas sistem perdagangan Indonesia, termasuk di dalamnya menuntaskan RUU Perdagangan yang masih tertunda penyelesaiannya untuk

memberi pedoman usaha perdagangan lebih jelas dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan bangsa.

Perbaikan kondisi ekonomi makro meliputi: menekan tingkat inflasi; menekan tingkat suku bunga; memperbaiki neraca perdagangan agar selalu dalam posisi surplus dengan mayoritas negara-negara mitra dagang Indonesia; memperkecil angka pengangguran; memperbaiki tingkat kompetensi para buruh; memperbaiki sistem birokrasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi; penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperbaiki kondisi infrastruktur khususnya prasarana jalan, jembatan, dan pelabuhan, memperbaiki sistem pendidikan agar setara dengan kualitas pendidikan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adler, Emmanuel dan Michael Barnett dalam CPF. Luhulima, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Jakarta; P2P LIPI, 2008.
- Arifin, Sjamsul, dkk. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta; Elex Media Komputindo, 2008.
- Hettne, *Global Politics of Regionalism*. London; Pluto Press, 2005.
- Hurrell, Andrew, *Regionalism in World Politics. US*; Oxford University Press, 1995.
- Mansbaach, Richard W., dalam Nuraeni Suparman dkk, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Marry, Farrel, *"The Global Politics of Regionalism; An Introduction"*.

- dalam Marry Farrel dan Bjorn Hettne and Luk Van Langerhove (eds) "Global Politics and Regionalism : Theory and Practice, Ann Arbor, MI : Pluto Press, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya, 2007).
- Rudy, T. May, *Studi Kawasan; Sejarah Diplomasia dan Perkembangan Politik di Asia*, Bandung; Bina Budaya, 1997.
- Wyatt, Andrew and Walter, "Regionalism, Globalization, and World Economic Order", (eds) in Fawcett, Louise and Andrew Hurrell, "Regionalism in World Politics", Oxford University Press, 1995.
- Zamrozi, *Paradigma Pendidikan di Masa Depan*, Yogyakarta; Bayu Indra Grafika, 2000.
- Jurnal dan Artikel :
- Crister, Jonson and Jonas Tallberg. "Compliance and Post Agreement in Bargaining". *European Journal of International Relations*. 1998.
- Vallarta, Puerto. *World Economic Forum on Latin America 2012*, Mexico (16-18 April 2012)
- Laporan Resmi :
ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database, ASEAN Merchandise Trade Statistics Database, ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national statistics offices, central banks and relevant government agencies, and from international sources), diolah 2014.
- International Finance Corporation (IFC) Annual Report 2013*
- International Finance Corporation (IFC) Annual Report 2014*
- Media Internet :
<http://www.bps.go.id>
<http://www.cpi.transparency.org>
<http://www.cpi.transparency.org>
<http://www.asiarisk.com>
<http://www.unesco.org>